

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI KELURAHAN ANTAPANI KIDUL KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG

Oleh:

Nyi Raden Ruyani¹ Ahtu Duriat² Ine Mariane³ Imas Sumiati⁴

¹²³⁴ (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan)

Email: ¹ruyani@unpas.ac.id ²ahtu.duriat@unpas.ac.id ³ine.mariane@unpas.ac.id

⁴imas.sumiati@unpas.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung yang meneliti tentang implementasi Kebijakan Walikota Bandung No. 76 tahun 2021 tentang Tata Cara Pendataan Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilaksanakan oleh Kelurahan Antapani Kidul kepada Masyarakatnya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan dalam pendataan yang tidak berdasarkan kepada petunjuk pelaksana dan tidak tepat sasaran program bantuan ini, yang pada masa sebelum pandemi *Covid-19* lebih diprioritaskan untuk warga yang miskin. Setelah pandemi *Covid-19* diprioritaskan untuk warga miskin yang terdampak *Covid-19*. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui tugas dan fungsi serta hambatan dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Antapani Kidul dalam rangka penyelesaian permasalahan ketidaktepatan sasaran dari program Bantuan Sosial dilingkungan Kelurahan Antapani Kidul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena untuk menentukan cara, mengumpulkan dan menganalisis data. Alat yang diukur dalam penelitian ini antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Walikota Bandung No. 76 tahun 2021 tentang Tata Cara Pendataan Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST). Dengan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh dan kemudian dilakukan analisis data dan uji validitas dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini adalah pada umumnya telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih ditemui beberapa permasalahan dalam pengimplementasiannya diantaranya masih banyak warga yang belum terdata untuk mendapatkan program Bantuan Langsung Tunai ini. Lalu terkait dengan struktur birokrasi yang masih belum banyak mengetahui tentang petunjuk pelaksanaan tentang Bantuan Sosial Tunai (BST).

Kata Kunci: Pandemi *Covid-19*, Bantuan Sosial Tunai, Komunikasi, Struktur Birokrasi, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT. This research was conducted in Antapani Kidul Village, Antapani District, Bandung City which examined the implementation of Bandung Mayor's Policy No. 76 of 2021 concerning Procedures for Data Collection on Targeted Families of Cash Social Assistance Beneficiaries (BST) carried out by Antapani Kidul Village to the Community. This research was motivated by the existence of problems in data collection that was not based on implementing instructions and not on target for this assistance program, which in the period before the Covid-19 pandemic was prioritized for the poor. After the Covid-19 pandemic, priority was given to the poor who were affected by Covid-19. This research was also conducted to find out the tasks and functions as well as obstacles and how the efforts made by Antapani Kidul Village in order to solve the problem of inaccuracy in the targets of the Social Assistance program in the Antapani Kidul Village environment. The method used in this research is qualitative research. This method was chosen because it determines how, collects and analyzes data. The tools measured in this study include communication, resources, disposition, bureaucratic structure on the implementation of Bandung Mayor's Policy No. 76 of 2021 concerning Procedures for Collection of Targeted Family Beneficiaries of Cash Social Assistance (BST). With primary data sources and secondary data obtained and then performed data analysis and validity test using triangulation techniques. The results of this study are that in general it has been carried out quite well, but there are still some problems in its implementation including there are still many residents who have not been registered to get this Cash Direct Aid program. Then it is related to the bureaucratic structure which still does not know much about the implementation instructions regarding Cash Social Assistance (BST).

Keyword : *Covid-19 Pandemic, Cash Social Assistance, Communication, Bureaucratic Structure, policy implementation*

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia, dalam hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor Indonesia juga masih kurang dalam sumber daya manusia, salah satunya masyarakat. Beberapa hal yang di hadapi oleh masyarakat Indonesia masih juga belum baik dalam segi sosial maupun politik, kemiskinan merupakan masalah yang sudah lama dihadapi oleh di Indonesia, kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan masih kurang, produktivitas lapangan kerja sedikit, tingkat upah sangat kurang, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan peluang kerja kurang, hingga politik yang belum stabil. Menurut data kemiskinan pada tahun 2017, beberapa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2016 hampir mencapai 28,51 juta orang di sekitar 11,13% (BPS, 2016: 5).

Data kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, menunjukan jumlah penduduk yaitu 49.935.858 jiwa, dengan jumlah penduduk miskin yaitu 4,19 juta jiwa (8,43%). Data jumlah penduduk Kota Bandung yaitu 2,44 juta jiwa sedangkan data jumlah penduduk Kecamatan Antapani yaitu 74.557 jiwa dengan jumlah penduduk miskin khususnya di Kelurahan Antapani Kidul berjumlah 2.897 jiwa.

Pada tahun 2020 negara Indonesia terkena musibah yang sangat berbahaya yaitu *Covid-19* menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Kenaikan harga barang masyarakat akan berdampak secara berantai pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat berpengaruh pada penurunan daya beli

sebagian banyak masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Pemerintah Indonesia memastikan *Covid-19* ini sangat berbahaya bagi seluruh dunia termasuk Indonesia yang semakin mengalami kenaikan kasus pada tahun 2020. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat pemerintah melaksanakan program BLT yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*. Dalam pelaksanaan Bantuan langsung tunai tak bersyarat yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2020 yang ditujukan kepada masyarakat bagi yang terkena *Covid-19*. Lalu pemerintah membuat suatu program BLT ini dalam upaya membantu masyarakat miskin yang terdampak dari *Covid-19* dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama pandemi besaran yang diterima oleh masyarakat sebesar Rp 600.000 dibulan pertama dan bulan selanjutnya sebesar Rp 300.000 selama tiga bulan.

Adapun peraturan yang berkaitan dengan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat di kota Bandung diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendataan Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bantuan Sosial Tunai (BST) ini sendiri merupakan program yang ada dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Di Jawa Barat penerima BST sebanyak 7.421.816. Di Kota Bandung sendiri penerima BST berjumlah 2.188.274. Kemudian Kecamatan Antapani terdapat 1.032 sedangkan khususnya Kelurahan Antapani Kidul terdapat 359 KK penerima BST. Adapun bantuan selama *Covid-19* adalah bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, Listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan dan BLT usaha mikro kecil.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa program BST di Kelurahan Antapani Kidul tidak tepat sasaran, karena tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendataan Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebutkan bahwa pendataan sasaran keluarga penerima Bantuan Sosial agar dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diantaranya yaitu masih banyak warga yang belum terdata sebagai calon penerima BST ini.

Selain itu Implementasi Program BST di Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani tidak optimal, karena data yang dipakai hanya dilakukan verifikasi dan validasi secara kasat mata dan tidak dilakukannya wawancara yang sesuai dengan petunjuk pelaksana. Pendataan BST ini dibutuhkan data yang valid serta untuk siapa dan di mana saja RTS yang pantas menerima BST tersebut bertempat tinggal.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung No. 76 Tahun 2021 Tentang

Tata Cara Pendataan Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho 2009:11).

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara

negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara. Sebagaimana dijelaskan Nugroho (2009), setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya.

Kekuasaan yang dimiliki negara tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekuatan paksa, tetapi memerlukan kebijakan (Parsons 2005). Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah, tetapi tidak akan efektif tanpa ada kebijakan publik yang dibuat. Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah dan karena kebijakan publik pada dasarnya merupakan kebijakan negara, maka kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian (*research methods*) yaitu cara yang akan digunakan

oleh peneliti untuk merancang, dilaksanakan, membuat data, dan ditarik kesimpulan berkenaan untuk masalah penelitian tersebut. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan yang dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut.

Teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini merupakan proses diperolehnya data dari sumber data, sumber data yang dimaknai berasal dari subjek penelitian. Untuk penelitian ini sumber data yang dikumpulkan menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi atau Studi Pustaka.

Pada penelitian kualitatif ini analisis data tidak perlu dilakukan pada saat data terkumpul dan selesai dalam pengolahan data. Dalam hal ini, data sementara yang telah terkumpul, data yang sudah ada dapat diolah dan dapat melakukan analisis data. Uraian analisis dalam bentuk deskripsi tersebut sejalan dengan pemahaman para ahli yang diungkapkan oleh Sugiyono (2010) dan Garna (1999) yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menguraikan permasalahan yang tengah diteliti dalam bentuk pengungkapan kata-

kata secara naratif dan bukan dalam bentuk uraian hasil perhitungan statistik.

Dalam analisis data penelitian menggunakan metode Miles dan Huberman. Dalam Sugiyono, Menurut Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan tanpa dikomunikasikan dengan baik tentunya tidak akan berhasil mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan harus dikomunikasikan oleh pelaksana kebijakan dengan tepat serta menggunakan saluran yang tepat pula.

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung, komunikasi merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian program ini. Guna melihat sejauhmana komunikasi dalam Implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Antapani Kidul dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi berkaitan dengan cara penyampaian informasi program, kejelasan berkaitan dengan peraturan

perundang-undangan yang dipakai untuk pelaksanaan program, dan konsistensi berkaitan dengan tingkat konsistensi dari pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan program Bantuan Sosial Tunai (BST).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lurah Kelurahan Antapani Kidul. Mengenai Komunikasi pada Implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) bahwa komunikasi yang dilakukan oleh kelurahan Antapani Kidul sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan ketua RW untuk menginformasikan tentang program Bantuan Sosial ini. Akan tetapi saat melakukan pendataan untuk warga yang belum teregistrasi ke dalam DTKS tidak dilakukan verifikasi ulang ke rumah warga yang sudah mengisi formulir untuk teregistrasi ke DTKS. Tidak juga dilakukan wawancara untuk warga yang belum masuk ke dalam DTKS. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan wawancara perlu dilakukan untuk mengetahui keadaan warga tersebut apakah benar-benar membutuhkan bantuan dari program Bantuan Sosial itu. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa undang-undang yang dipakai di Kelurahan Antapani Kidul untuk pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak diketahui atau tidak jelas undang-undang apa yang dipakai.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor kedua setelah komunikasi yang akan turut mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi program. Sumber daya merupakan segala sesuatu yang mendukung terhadap berhasilnya suatu program.

Dengan demikian, dalam implementasi program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung bukan hanya komunikasi saja yang harus diperhatikan, namun apabila sumber dayanya kurang, maka implementasi kebijakan penataan ruang tidak akan berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lurah Kelurahan Antapani Kidul. Mengenai Sumber Daya pada Implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) bahwa petugas yang menjadi pelaksana Bantuan Sosial ini dinamakan dengan Panitia Kegiatan Bantuan Sosial, yang terdiri dari Lurah sebagai penanggung jawab dan juga sebagai pimpinan tertinggi; Ketua pelaksana yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan; 3 orang yang memiliki Surat Keterangan dari provinsi yang bertugas di *front office* terkait dengan pelayanan, *back office* terkait dengan pengolahan data, dan yang terakhir sebagai verifikasi atau orang yang akan memverifikasi data yang sudah diisi dengan apa yang ada dilapangan; linmas atau petugas keamanan yang

mengamankan jalannya pendistribusian mulai dari mengatur parkir, mengatur agar tidak berkerumun karena sedang terjadi pandemi *Covid-19* dan juga mengingatkan para penerima untuk tetap menjaga protokol kesehatan; sukarelawan yang ditunjuk langsung oleh Kasie Kesos yang berasal dari karang taruna. Semua panitia mendapatkan gajinya masing-masing dan tidak mendapatkan gaji tambahan dari kegiatan pendistribusian Bantuan Sosial ini tetapi mendapatkan jatah makan dan minum dari kelurahan. Sukarelawan yang berasal dari karang taruna tidak mendapatkan gaji karena tidak mendapatkan Surat Keterangan dan hanya mendapatkan Surat Tugas atau Surat Perintah serta mendapatkan juga jatah makan dan minum. Dari syarat-syarat yang belum masuk kedalam DTKS yang sudah disebutkan diatas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap pelaksana kebijakan atau program. Disposisi merupakan faktor yang ketiga yang turut mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Disposisi atau sikap pelaksana ini sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan atau program walaupun komunikasi dan sumber daya berguna menunjang implementasi kebijakan atau program sudah baik, namun apabila pelaksana kebijakan atau program tidak akan efektif.

Disposisi dapat diukur dari Pengangkatan Birokrat dan Insentif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lurah Kelurahan Antapani Kidul. Mengenai Sumber Daya pada Implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) bahwa untuk pengangkatan panitia pelaksana program Bantuan Sosial di Kelurahan Antapani Kidul terdapat penanggung jawab yaitu Lurah Kelurahan Antapani Kidul, ketua pelaksana yaitu Kasie Kesos Kelurahan Antapani Kidul, 3 orang yang mendapatkan SK dari provinsi dan kota, serta relawan yang membantu kegiatan yang berasal dari karang taruna. Insentif yang diberikan untuk para panitia adalah gaji pokok mereka masing-masing karena pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing. Sedangkan untuk para relawan tidak diberikan insentif tetapi diberikan jatah makan dan minum pada saat kegiatan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan faktor terakhir yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi akan memberikan gambaran tentang para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kewenangannya, serta pembagian kerja sehingga tidak terjadi overlapping pelaksanaan tugas dalam pengimplementasian kebijakan. Struktur birokrasi ini tentunya harus diatur

sedemikian rupa agar tujuan kebijakan tercapai secara efektif, seperti yang dikemukakan Edward berikut:

Guna mengukur struktur birokrasi ini, maka ada dua aspek yang digunakan yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP), dan *Fragmentation* (Fragmentasi).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lurah Kelurahan Antapani Kidul. Mengenai Struktur Birokrasi pada Implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) bahwa kelurahan Antapani Kidul melakukan kerjasama dengan beberapa instansi lain untuk melancarkan kegiatan Bantuan Sosial Tunai diantaranya adalah ketua RT dan ketua RW, kantor kecamatan Antapani khususnya Seksi Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial, dan juga para relawan yang berasal dari karang taruna.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung No. 76 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendataan Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung pada umumnya telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih ditemui beberapa permasalahan dalam pengimplementasiannya. Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung No. 76 Tahun 2021 di Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung

dilihat dari aspek komunikasi, pada prinsipnya pemerintah Kelurahan Antapani telah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait program BST ini namun saat pendataan untuk warga yang belum teregistrasi ke dalam data DTKS tidak dilakukan verifikasi ulang dan wawancara ke rumah warga. Sumber daya untuk mengimplementasikan program ini sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana, namun masih banyak kekurangan SDM secara kualitas dan kuantitas untuk melakukannya. Sementara untuk aspek disposisi, para pelaksana program memiliki karakteristik yang cukup baik untuk keberhasilan implementasi program Bantuan Sosial ini, walaupun masih cara yang dilakukan untuk merekrut para pelaksana ini yaitu sukarelawan dilakukan dengan cara menunjuk langsung tanpa adanya seleksi terlebih dahulu. Struktur birokrasi dalam implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) ini pun juga sudah sesuai petunjuk pelaksana dimana pemerintah kelurahan Antapani Kidul bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Antapani dan juga Dinas Sosial Kota Bandung untuk mensukseskan program Bantuan Sosial ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Furchan. 2004 . Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
 Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke

implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Arikunto, S. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Karya.

Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance (A-Z Keuangan Syariah)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Badan Pusat Statistik

Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3.

Budi, Winarno. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo, 2002.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Revisi).

Dye, Thomas R., 1992. *Understanding Public Policy*. New Jersey : Englewood Cliffs.

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. USA: Texas A & M University

Kencana, Inu Syafei. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : PT Bumi Askara.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mubyarto. 1998. Pengantar Ekonomi Pertanian, Edisi III. Jakarta: LP3ES.
- Nawawi, Ismail, 2009. Perilaku Administrasi, Kajian Paradigma, Konsep, Teori dan Pengantar Praktik. Surabaya: ITS Press.
- Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Subarsono. (2008). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:, Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sumanta, Jaka. (2005). Fenomena lingkaran kemiskinan di Indonesia : Analisis ekonometri regional data panel propinsi tahun 1999-2002. MPKP UI.
- Sumodiningrat, Gunawa. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta, dan Kebijakan*. Jakarta: impac.
- Suparlan, Supardi, 1995, Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropolog Perkotaan, Yogyakarta: YOI.
- Sutabri Tata, 2016, Sistem Informasi Manajemen, Andi Offset, Yogyakarta.
- Todaro, Michael. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan, 2004.
- Widodo, Joko. (2007). *Analisa Kebijakan Publik*. Malang:Bayu Media Publishing
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan studi kasus. Yogyakarta: Caps